

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Gempa 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 SR yang berpusat di Padang Pariaman, meninggalkan catatan pilu bagi masyarakat Sumatera Barat. Data terakhir Satkorlak, 1.195 orang kehilangan nyawa (Singgalang, 30 Oktober 2009), 2.902 orang luka berat dan ringan, 278.286 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari retak-retak hingga rata dengan tanah, 3.699 unit fasilitas umum tak jauh berbeda, ambruk dan sujud ke bumi (Harian Padang Ekspres, 15 Oktober 2009). Dampak langsung bencana gempa dengan kekuatan 7.9 SR mengakibatkan robohnya beberapa bangunan pasar di Pasar Raya Padang yang merupakan sentra ekonomi kota. Bangunan fisik pasar yang ambruk antara lain adalah bangunan Inpres I, bangunan Inpres II lantai II yang merupakan pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan harian (sembako). Bangunan lainnya, mengalami kerusakan parah seperti Sentral Pasar Raya yang kemudian dirobohkan karena dinyatakan tidak layak, bangunan Fase VII lantai II dan III dan bangunan-bangunan lainnya juga mengalami kerusakan parah. Adapun Pasar Inpres III, Inpres II lantai 1 dan Pertokoan Fase VII lantai 1 dinyatakan masih layak huni oleh GAPEKSINDO dan Institut Teknik Padang (Surat Gapeksindo Kota Padang Berdasarkan hasil analisis kerusakan Tim Tekhnis Gapeksindo Kota Padang sebagaimana surat Nomor : 50/GAPEKSINDO/2009 tertanggal 28 Oktober 2009 menyatakan bahwa Pasar Inpres III (lantai 1 dan 2) Layak Huni. Berdasarkan hasil analisis kerusakan Tim Tekhnis Gapeksindo Kota Padang sebagaimana surat Nomor : 55/GAPEKSINDO/2009 tertanggal 2 November 2009 Gedung Pasar Inpres II Pada Lantai 1 Layak Huni).

Tidak jauh berbeda dengan penanggulangan bencana lainnya di Indonesia, penanggulangan bencana Sumatera Barat tidak lepas dari berbagai masalah sosial. Permasalahan itu antara lain mulai dari soal pendataan, pendistribusian bantuan yang tidak

merata, hingga kebijakan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Masalah pendataan dan pendistribusian bantuan yang tidak merata terjadi hampir di semua daerah yang terkena bencana gempa Sumatera Barat dalam masa tanggap darurat. Selain itu pelaksanaan distribusi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi juga tidak luput dari masalah, mulai dari kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan. Pada level kebijakan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik mengalami masalah yang sama dan bahkan mendapat penentangan dari masyarakat korban bencana dalam bentuk protes. Protes kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi muncul karena kebijakan dan dampak pelaksanaannya yang sejak awal sudah menuai masalah. Protes terhadap kebijakan terutama terjadi di kota Padang dengan korban fasilitas publik terbanyak. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Padang menjadi salah satu kebijakan yang mendapat penentangan dari korban bencana dan menimbulkan konflik sosial pasca bencana.

Penolakan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi kemudian menuai konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik kemudian menjadi manifes dan melahirkan banyak protes dari korban bencana dengan massa yang luas. Eskalasi konflik terus terjadi dan melahirkan puluhan demonstrasi menentang kebijakan penanggulangan bencana yang terutama dimotori oleh konflik rehabilitasi dan rekonstruksi pasar raya Padang.

Isu bencana terus menggelinding hingga ke bantuan bencana gempa tahun 2007 yang belum dicairkan oleh Pemko Padang hingga bencana tahun 2009. Korban bencana tahun 2007 yang sampai bencana 2009 belum menerima bantuan dari Pemko Padang turut menjadi bagian dari aksi protes korban bencana Pasar Raya Padang. Dalam aksi-aksi demonstrasi, mereka menjadi element aksi yang menyuarakan masalah pengelolaan bencana, terutama pencairan bantuan gempa 2007.

Protes korban bencana yang terus menggelinding juga menyeret kasus-kasus lain yang pernah muncul dan mengendap. Protes sebagai salah satu bentuk perlawanan terus bereskalasi

dan melibatkan banyak kelompok korban pembangunan kota Padang secara umum. Tidak hanya korban pembangunan Pasar Raya pasca bencana, korban pembangunan sejak Terminal Lintas dihapus dan dijadikan Plaza serta korban pembangunan Terminal Gon Hoat Menjadi Sentral Pasar Raya (SPR).

Akar konflik yang muncul antara pemerintah dengan korban bencana adalah pembangunan kios darurat yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang tanpa melibatkan pedagang yang menjadi korban bencana. Kebijakan pembangunan kios darurat oleh Pemko Padang tidak hanya sampai pada pembangunan kios, namun berlanjut ke kebijakan-kebijakan lain, seperti pembangunan Pasar Inpres II, III, dan IV, serta pembangunan Fase VII lantai II dan III, yang juga ditentang oleh pedagang yang kemudian menjadi pemicu lahirnya konflik konflik baru.

Meskipun faktor yang mendorong munculnya konflik adalah pembangunan kios darurat, namun dalam skala besar terdapat tiga kebijakan yang menjadi faktor penyebab munculnya konflik antara masyarakat dengan Pemko Padang, yaitu:

- a. Kebijakan pembangunan kios penampungan sementara pada masa tanggap darurat yang dianggap merugikan pedagang.
- b. Kebijakan pembangunan ulang pasar Inpres I, II, III dan IV yang dianggap oleh pedagang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang dan keluar dari konteks penanggulangan bencana.
- c. Pembangunan Fase VII lantai II dan III yang mengharuskan pengosongan pada lantai I.

Penolakan rehabilitasi dan rekonstruksi ini berawal dari pembangunan kios sementara yang diklaim oleh pedagang dilakukan secara sepihak oleh Pemko Padang. Menurut pedagang jumlah pembangunan kios darurat yang dibangun oleh Pemko Padang melebihi kapasitas. Korban bencana hanya Inpress I lantai 1 dan 2, dan inpres II lantai 2. Jumlah pedagang pada bangunan yang rusak karena bencana dan harus direlokasi dalam rangka memperbaiki bangunan pasar yang roboh berjumlah sebanyak \pm 450 orang, namun kios darurat yang

dibangun sebanyak 1.100 unit. Namun, menurut Dinas Pasar kios darurat yang dibangun tersebut sudah sesuai dengan jumlah pedagang yang menjadi korban bencana. Pembangunan yang melebihi kapasitas ini menurut pedagang menutupi akses pengunjung ke pasar sehingga mengganggu aktivitas perdagangan. Gangguan aktivitas mengakibatkan pedagang mengalami kemerosotan jual beli hingga 75% dari penjualan hari-hari biasanya. Keberadaan kios darurat yang menurut pedagang dibangun secara sepihak oleh Pemko Padang menuai protes dari pedagang pasar yang akses pembeli ke tempat mereka berdagang tertutup oleh kios darurat (sumber: PBHI Sumbar).

Pada tanggal 10 November 2009, Kepala Dinas Pasar melalui surat Nomor: 900.1699.XI/PS-09 memberitahukan kepada pedagang Inpres I, II, III dan IV untuk mengosongkan petak toko/kios untuk pindah ke kios penampungan sampai batas waktu tanggal 13 November 2009. Apabila sampai batas waktu itu tidak dilakukan, Dinas Pasar akan melakukan upaya paksa pengosongan. Pemberitahuan yang disampaikan oleh Dinas Pasar Kota Padang untuk mengosongkan petak toko/kios menyadarkan pedagang bahwa Pemko Padang juga akan merekonstruksi bangunan Inpres II, III dan IV yang layak pakai berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Teknis Gapeksindo Kota Padang. Menanggapi surat pemberitahuan Dinas Pasar tersebut, Rabu 11 November 2009, Aliansi Pedagang Pasar Raya (APPR) menggelar aksi damai dengan melibatkan 2000 pedagang ke DPRD Kota Padang. Hasil aksi tersebut melahirkan Rekomendasi Nomor : 175/057/DPRD-Pdg/2009 tertanggal 11 November 2009, meminta Pemko Padang agar membongkar Kios dan Los Darurat dan membicarakan dengan duduk bersama antara Pemko, DPRD dan Perwakilan Pedagang dalam pelaksanaan Rekomendasi ini. Namun rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD tidak mendapat perhatian dari pemko Padang dengan tetap tidak membongkar kios darurat (<http://www.google.co.id>).

Pada hari Senin tanggal 15 November 2009, melalui Surat Nomor: 511.2.1728.XI/Ps-2009 bermaterai Rp 6.000,- Kepala Dinas Pasar Drs. H. Deno Indra Firmansyah, MM sebagai pihak pertama menandatangani Berita Acara Serah Terima 500 buah kios dan 600 los kepada Usman Gumanti dan Joni Sofyan pegawai Dinas Pasar sebagai pihak kedua untuk mendistribusikan 500 kios dan 600 los kepada Pedagang Inpres I, II, III, dan IV. Setelah itu, Rabu tanggal 10 Februari 2010 pedagang Pasar Raya Padang melakukan aksi tutup toko dan bersama Forum Warga Kota (FWK) kurang lebih 3.000 massa melakukan aksi unjuk rasa ke rumah dinas Walikota Padang sesuai STTP No. STTP/9/II/2010/Intelkam. Gagal bertemu Walikota Padang, massa terpancing emosi dan bentrok dengan polisi (Elsera, 2012).

Kebijakan Pemko dalam pembangunan ulang Pasar Inpres I, II, III dan IV, dianggap oleh pedagang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang dan keluar dari konteks penanggulangan bencana. Meski masih dalam konflik, Pemko Padang tetap melanjutkan pembangunan Inpres I. Rencana awalnya pembangunan Pasar Raya Padang mulai dari Inpres I sampai IV menelan anggaran sebesar Rp 237 miliar.

Pembangunan ulang Pasar Inpres I yang sekarang berganti nama dengan Blok I dianggap oleh pedagang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang dan keluar dari konteks penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan Blok I yang baru dibangun oleh Pemko tersebut ukuran dan bentuknya tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang. Ukuran kios yang dibangun oleh Pemko di Blok I itu sangat kecil. Demikian juga halnya dengan los/ meja batu yang dibuat oleh Pemko sangat tinggi dan kecil hal ini tidak sesuai dengan jenis dagangan pedagang yang pada umumnya adalah sembako dan sayuran. Selain itu harga yang ditawarkan Pemko juga sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan sebagian pedagang masih bertahan berdagang di luar Blok I. Sementara itu, menurut Dinas Pasar kios yang ada di Pasar Blok I saat ini sudah sesuai dengan konsep pasar tradisional modern, demikian juga dengan harga yang ditawarkan oleh Pemko itu sudah sesuai dengan fasilitas yang ada di Pasar Blok I Pasar Raya Padang.

Pedagang Fase VII diminta mengosongkan toko melalui surat pemberitahuan dari dinas Pasar Kota Padang tanggal 28 Oktober 2009. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Dinas Pasar karena akan dilakukan perbaikan pada lantai II dan III. Perintah pengosongan lantai I ditolak oleh pedagang fase VII karena menurut mereka, perbaikan pada lantai II dan lantai III dapat dilakukan dengan dengan mengosongkan lantai I. Penolakan yang dilakukan oleh pedagang pada fase VII didasarkan pada hasil kajian kelayakan bangunan yang dilakukan oleh Institut Teknologi Padang (ITP) yang telah melakukan pengujian kelayakan bangunan terhadap fase VII. Menurut rekomendasi yang diberikan oleh ITP, struktur bangunan fase VII masih layak pakai dan tidak harus dilakukan pembongkaran. Kemudian untuk melakukan perbaikan pada lantai II dan III tidak harus melakukan pengosongan pedagang pada lantai I. Meskipun pedagang memiliki argumentasi akademik dalam melakukan penolakan terhadap pengosongan dengan menggandeng ITP untuk melakukan melakukan kajian teknis, namun pihak pelaksana pembangunan pada lantai II dan III tetap ingin pedagang pada lantai I harus dikosongkan. Argumentasi pelaksana, tidak dikosongkannya bangunan pada lantai I menghambat pekerjaan pembangunan pada lantai II dan III. Hal inilah yang melahirkan konflik dan protes dari pedagang pada fase VII. Pedagang menilai pelaksana pembangunan tidak profesional. Penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya, dimana pembangunan yang dilakukan pada lantai II dan III tidak dengan mengosongkan pedagang pada lantai I.

Konflik antara pedagang dengan Pemerintah Kota Padang terhitung semenjak lahirnya konflik pada awal pembangunan kios darurat (23 Oktober 2009) hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun. Konflik tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain: PBHI, DPRD kota Padang, dan Komnas HAM.

1.2. Perumusan Masalah

Konflik yang terjadi antara Pemko Padang dengan pedagang Pasar Raya telah berlangsung selama 3 tahun. Sudah banyak elemen yang terlibat dalam konflik ini, namun belum mampu mengatasi konflik ini. Pembangunan Pasar Blok I Pasar Raya Padang tidak terlepas dari masalah. Hal ini terlihat mulai dari masalah pembangunan kios darurat, sampai pada telah selesainya kios-kios yang dibangun di Blok I tapi banyak tidak ditempati oleh pedagang. Oleh sebab itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana resistensi pedagang terhadap kebijakan Pemko Padang dalam pembangunan Blok I Pasar Raya Padang (studi pada pedagang Inpres I Pasar Raya Padang)?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang resistensi pedagang terhadap kebijakan Pemko Padang dalam pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan penyebab resistensi pedagang terhadap pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi yang sudah dilakukan pedagang Pasar Inpres I untuk memperjuangkan kepentingannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis berguna memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi, dan juga sebagai bahan masukan bagi penelitian yang lebih lanjut agar dapat lebih baik mempertahankan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

2. Secara praktis sebagai masukan bagi Dinas Pasar dalam mengambil keputusan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Resistensi

Resistensi berasal dari kata *resist* dan *ance* adalah menunjukkan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang. Namun resistensi dapat juga berarti perlawanan dengan mempromosikan perubahan sosial atau menentang perubahan yang dipromosikan kelompok lain (<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistensi&oldid=5186336>).

Scott (dalam Alisjahbana, 2005: 38-39) mendefinisikan resistensi adalah setiap (semua) tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin dan lain-lain) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sendiri terhadap kelas-kelas atasan ini. Artinya tidak ada keharusan bagi resistensi untuk mengambil bentuk aksi bersama. Aksi yang dilakukan bisa bersifat individual, spontan, dan tak terorganisasi. Tujuan-tujuan resistensi dibentuk, yakni agar ada reaksi balik dari pihak yang dilawan. Reaksi itu berupa tindakan yang melunakkan atau menghilangkan segala bentuk tuntutan yang dibebankan kepadanya. Resistensi yang dimaksud lebih mengarah pada resistensi simbolis atau ideologis (misalnya gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari resistensi berdasarkan kelas.

Konsep resistensi yang digunakan oleh Scott adalah resistensi sehari-hari (*everyday forms of resistanc*), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus antarkaum tani dan orang-orang yang berupaya untuk menarik tenaga kerja, makanan, pajak,

sewa, dan keuntungan dari mereka. Kebanyakan resistensi bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang yang tidak berdaya seperti mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, dan seterusnya (Scott, 2000: 40).

Pedagang Pasar Inpres I dalam penelitian ini diasumsikan melakukan resistensi yaitu sebuah sikap untuk bertahan, berusaha melawan dan menentang kebijakan Pemko dalam pembangunan ulang Pasar Inpres I Pasar Raya Padang. Hal ini terlihat ketika banyak pedagang yang berusaha melawan dan menentang kebijakan Pemko mulai dari awal pembangunan sampai saat bangunan Pasar Inpres I yang baru selesai dibangun. Masih banyak kios-kios yang masih kosong tidak ditempati oleh pedagang.

1.5.2. Resistensi dalam Kajian Sosiologi Konflik

Resistensi dalam kajian sosiologi konflik berbeda dengan definisi konflik. Jika konflik adalah pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih maka resistensi adalah sikap bertahan terhadap pihak lain yang mencoba mengambil atau merebut sumber daya yang dimiliki. Tetapi resistensi juga dapat dipahami sebagai upaya atau tindak bertahan dengan jalan melawan atau menentang sebuah perubahan.

Konflik menurut Randal Collins (dalam Ritzer, 2004: 160-164) adalah pertentangan kepentingan (disebabkan dari hal yang bersifat individual hingga struktural) yang timbul dari kepentingan manusia yaitu memaksimalkan keuntungan dan konflik mungkin terjadi karena adanya penggunaan kekerasan. Randal Collins menyatakan (dalam Ritzer, 2004: 162-163) suatu kelompok akan berjuang mewujudkan kepentingannya jika pihak lawan telah menggunakan kekerasan. Upaya yang dilakukan suatu kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya tergantung kepada sumber daya yang mereka punya maupun sumber daya

lawan yang mereka hadapi. Menurut Collins (dalam Ritzer, 2004: 162) konflik dapat terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan yang selalu dapat dipakai seseorang atau banyak orang dalam lingkungannya. Setiap orang berupaya untuk memaksimalkan status subyektif mereka dan kemampuan untuk berbuat demikian tergantung pada sumber daya mereka maupun sumber daya orang lain dengan siapa mereka berurusan.

Menurut Karl Marx (dalam Johnson, 1986: 148-149), konflik adalah pertentangan kepentingan antara dua kelas yaitu borjuis dan proletar. Penyebab pertentangan kepentingan yang ditonjolkan oleh Marx adalah struktural yakni struktur ekonomi kapitalis, yang mana kaum proletar memiliki kepentingan akan upah yang bertentangan dengan kepentingan borjuis yang ingin memaksimalkan keuntungan (laba). Marx mendefinisikan konflik sebagai pertentangan kepentingan yang nyata yaitu kepentingan materialistis, kepentingan terhadap laba dan upah. Jika dihubungkan perspektif teoritik dengan kajian sosiologi konflik maka resistensi dapat dilihat sebagai perjuangan kelas (*Struggle Class*) oleh Karl Marx.

Ralf Dahrendorf hampir serupa mendefinisikan konflik sebagai pertentangan antara dua kelas yaitu kelas pemegang otoritas dengan kelas yang tidak punya otoritas. Distribusi kekuasaan (otoritas) dan sumber daya yang tidak seimbang adalah penyebab terjadinya konflik. Pemikiran inilah yang mendasari Dahrendorf melihat realitas masyarakat sebagai wujud dari konflik yang terus menerus. Pemikiran tentang otoritas merupakan poin penting yang dikaji lebih dalam oleh Dahrendorf dalam melihat masyarakat. Kepentingan tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat non material berupa nilai-nilai. Dengan demikian konflik menjadi suatu pertentangan kepentingan nyata dan struktural karena diproduksi struktur sosial .

Teori konflik Ralf Dahrendorf (dalam Johnson, 1990: 182-183), menarik perhatian sejak terbitnya buku *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Dahrendorf menolak tekanan kaum fungsionalis pada integrasi, nilai dan konsensus normatif, serta stabilitas karena

berat sebelah; sebaliknya, dia berusaha untuk mendasarkan teorinya pada suatu perspektif Marxis yang modern yang menerima meluasnya konflik sosial yang didasarkan pada oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik itu dalam melahirkan perubahan sosial. Dahrendorf tidak menggunakan perspektif Marxis sebagai suatu dasar untuk kritik budaya yang radikal. Sebaliknya dia menekankan tingkat analisa struktur sosial. Khususnya, dia mengkritik Marx mengenai teori pembentukan kelas dan teori konflik kelasnya yang hanya relevan untuk tahap awal kapitalisme, bukan untuk masyarakat industri *post-capitalist*.

Menurut Dahrendorf (dalam Ritzer dan Goodman, 2008: 283) bagi para teoretisasi konflik, masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan” sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas atas pihak lain. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor penentu konflik sosial sistematis. Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah otoritas yang berlainan. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi.

Dahrendorf membedakan tiga tipe besar kelompok, yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik (Ritzer dan Goodman, 2008: 284). Dengan mengikuti Morris Ginsberg, untuk tipe khusus kelompok sosial ini akan kita pakai istilah kelompok-semu. Kelompok adalah sekumpulan orang yang berhubungan atau berkomunikasi secara teratur, dan mempunyai sebuah struktur yang dapat dikenal. Ada lagi kumpulan atau bagian lain dari komunitas itu yang tidak mempunyai struktur yang dapat dikenal, tetapi anggotanya mempunyai kepentingan tertentu atau mempunyai cara-cara berperilaku bersama, yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan mereka membentuk diri mereka sendiri menjadi kelompok yang sesungguhnya. Kelompok semu adalah sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Termasuk ke dalam pengertian kelompok semu ini kesatuan-

kesatuan seperti kelas-kelas sosial; kesatuan-kesatuan seperti kelas-kelas sosial; kesatuan-kesatuan ini tanpa kelompok dan menjadi tempat merekrut anggota baru bagi kelompok-kelompok; dan anggotanya mempunyai kekhasan cara-cara berperilaku bersama tertentu (Dahrendorf, 1986: 220-221).

Kelompok kepentingan, yang anggotanya direkrut dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi; dan mereka adalah agen yang sesungguhnya dari pertentangan kelompok. Kelompok kepentingan ini memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan, dan anggota-anggota (Dahrendorf, 1986: 222). Kelompok konflik, atau kelompok yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut (Ritzer dan Goodman, 2008: 284).

Menurut Dahrendorf (dalam Ritzer dan Goodman, 2008: 284-285) konsep kepentingan laten (yang tidak disadari) dan *manifest* (disadari), kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik, adalah dasar bagi penjelasan konflik sosial. Dahrendorf (dalam Johnson, 1990: 186) menjelaskan ada tiga kondisi di mana kepentingan laten itu menjadi *manifest* dan kelompok semu dapat berubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat konflik. Kondisi-kondisi ini diklasifikasikan sebagai kondisi teknis, kondisi politik, dan kondisi sosial. Dalam masing-masing kategori, variable-variabel tertentu yang mempengaruhi tingkat pembentukan kelompok konflik diidentifikasi.

Kondisi teknis, Dahrendorf mendiskusikan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi. Keduanya dianggap penting untuk pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif. Tidak ada tindakan kelompok yang diorganisasi dapat terjadi tanpa suatu tipe kepemimpinan dan suatu bentuk kepercayaan yang membenarkan atau ideologi (Johnson, 1990: 186).

Dalam kondisi politik, Dahrendorf

menekankan tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan kelompok dan tindakan kelompok. Pada tingkat masyarakat, suatu yang ekstrem dapat kita lihat dalam pemerintahan totaliter yang dengan keras melarang terbentuknya partai politik oposisi atau tipe asosiasi sukarela lainnya. Ekstrem lainnya dapat kita lihat dalam masyarakat demokratis terbuka di mana ada toleransi yang sangat besar terhadap macam-macam kelompok konflik untuk mengejar kepentingan mereka dalam batas-batas pengaturan hukum yang luas yang dimaksudkan untuk melindungi kemerdekaan ini bagi semua orang. Variasi yang sama dapat pula kita amati dalam asosiasi-asosiasi tertentu. Dalam beberapa asosiasi, pembentukan kelompok konflik secara terang-terangan atau samar-samar dipersulit, kalau bukan dilarang, sedangkan dalam asosiasi yang lain, kelompok konflik itu diizinkan atau diharapkan untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, paling tidak dalam batas-batas tertentu (Johnson, 1990: 187).

Kategori kondisi sosial terutama meliputi tingkat komunikasi antaranggota dari suatu kelompok semu. Kelompok-kelompok konflik pasti tidak akan muncul di antara orang-orang yang terpencil satu sama lain yang secara ekologis sangat terpencar-pencar atau yang tidak mampu atau tidak bersedia karena alasan apapun untuk membentuk ikatan sosial (Johnson, 1990: 187).

Dalam penelitian ini, resistensi konflik yang dipakai adalah resistensi konflik menurut Ralf Dahrendorf. Hal ini dikarenakan Pemko Padang sebagai pemegang otoritas dan pengambil kebijakan bertentangan kepentingan dengan pedagang Pasar Inpres I Pasar Raya Padang. Pemko sebagai pemegang otoritas menginginkan rekonstruksi Pasar Inpres dan menetapkan harga jual pada pedagang yang ingin menempati bangunan yang sudah direkonstruksi tersebut, namun pedagang Inpres I masih bertahan dan menolak kebijakan Pemko Padang. **1.5.3.**

Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi yang menyangkut konflik dan gerakan sosial telah diteliti oleh Perdana Putera (2006), “Gerakan Pedagang Menentang Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Gerakan Pedagang Menentang Kebijakan Pemerintah Kota Padang Tentang Pembangunan Pasar Modern di Areal Terminal Goan Hoad Padang)”. Penelitian ini menemukan bahwa gerakan yang dilakukan oleh KPP (Kesatuan Pedagang Pasar) dalam hal menentang pembangunan Pasar Modern di Area Terminal Goan Hoad mengalami kegagalan. Hal ini ditandai dengan tetap berjalannya proses pembangunan pasar modern. Kegagalan KPP dalam melakukan gerakan disebabkan oleh respon pemerintah yang acuh tak acuh dan melakukan perlawanan non-fisik.

Studi yang menyangkut konflik dan gerakan sosial telah diteliti oleh Marisa Elsera (2012), “Penyebab Konflik dan Upaya Penyelesaiannya antara Pedagang Inpres II, III, dan IV dengan Pemko Padang”. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan rehabilitasi dan rekonstruksi berawal dari pembangunan kios sementara yang diklaim oleh pedagang dilakukan secara sepihak oleh Pemko Padang. Perbedaan keinginan dan perspektif antara pedagang Inpres II, III dan IV dengan Pemko Padang yaitu Pemko berkeinginan untuk membangun ulang Pasar Raya Padang dengan membongkar bangunan yang lama dan kemudian dibangun dengan konstruksi yang baru. Sementara pedagang berkeinginan agar Pemko cukup merehabilitasi Inpres II, III dan IV dengan alasan bahwa struktur bangunan gedung masih layak untuk direhabilitasi. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pedagang dan Pemko untuk penyelesaian konflik ini, yaitu dengan cara menyurati Pemko bahwa pedagang menolak pembangunan Pasar Inpres dan membangun aliansi. Sementara itu Pemko Padang berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pedagang dan menjalin aliansi dengan pedagang berbagai pihak. Banyak aktor yang terlibat dalam konflik ini diantaranya DPRD, PBHI, FWK, Ampepara, dan Komnas HAM.

Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di mana penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada resistensi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Inpres I terkait konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Dalam sebuah proses penelitian, metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi acuan bagi peneliti dalam mencari data yang valid, mengelola, dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut. Herdiansyah (2011: 3) menyampaikan metodologi sebagai sekumpulan aturan dalam melaksanakan penelitian berdasarkan kadar ilmiah dari disiplin ilmu tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi penelitian akan menuntun peneliti untuk menghasilkan penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan pula nantinya.

Menurut Muhadjir (dalam Afrizal, 2008:12) membedakan antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Metodologi penelitian adalah berbicara mengenai teori dan konsep-konsep metode penelitian, sedangkan kata metode penelitian mengacu kepada teknis operasional melakukan pengumpulan data. Metode penelitian diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan cara yang dipakai oleh peneliti untuk mensiasati suatu masalah penelitian, berarti berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab dalam penelitian. Metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya (Afrizal, 2008: 12-13).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini mencari data mengenai resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang, peneliti merasa perlu untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori terbentuknya kelompok dari Ralf Dahrendorf Data tersebut dapat diperoleh melalui metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2008: 14). Namun, tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini akan diperoleh data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang berguna untuk memperkuat data kualitatif yang telah diperoleh. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Moleong (dalam Herdiansyah 2011: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik.

Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan, diantaranya; penggunaan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang ingin diteliti. Kemudian metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan suatu topik secara lebih detail dan terperinci, serata peneliti dapat meneliti subjek penelitian dalam latar yang alamiah (Herdiansyah 2011: 15-16). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat menyajikan secara lebih detail mengenai resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang dan mempelajari bagaimana sesungguhnya resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang dengan latar alamiah dari konflik tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa data yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan (Moleong, 1998 : 3). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati, yang di arahkan pada latar individu tersebut secara menyeluruh (*holistik*) dan utuh. Pendekatan ini dipilih karena lebih mampu dalam menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subyek, perilaku, motif-motif subyek, perasaan dan emosi orang yang diamati, yang merupakan definisi situasi subyek yang diteliti.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data-data yang diperoleh di lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 1998 : 6). Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Adapun tujuan dari penelitian yang bertipe deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena.

1.6.2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang relevan dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan respon terhadap suatu (hal-hal yang berada di luar diri mereka), melainkan sebagai subyek. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai tersebut juga disebut sebagai subyek

penelitian. Informan penelitian juga diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley dalam Afrizal, 1997 : 35-36). Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai dengan kepentingan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi dasar penulisan laporan. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. *Purposive*, artinya para peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Oleh sebab itu, informan diharapkan benar-benar pedagang yang melakukan resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang. Adapun kriteria informan adalah:

1. Ketua Pedagang Pasar Inpres I
2. Pedagang yang terlibat aktif dalam konflik dengan Pemko Padang
3. Dinas Pasar Raya Padang

Teknik ini mempertimbangkan azas kejenuhan data yaitu apabila sudah terdapat jawaban yang sama pada setiap informan, maka penambahan jumlah sampel dihentikan, maksudnya adalah peneliti menentukan sendiri informan penelitian berdasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian (Singarimbun 1989: 112). Kriteria tersebut mestilah menjamin validitas data yang akan dikumpulkan.

Peneliti melakukan validasi data dengan beberapa cara, yakni membuat catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara aktual dan menunjukkan versi ringkas

yang sesungguhnya terjadi. Tahap kedua adalah perluasan catatan lapangan, peneliti mengingat kembali hal yang tidak tercatat secara cepat (Spradley, 1997: 95).

Adapun wawancara berkualitas dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti:

- 1) jenis kelamin pewawancara, perbedaan jenis kelamin antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi kualitas data, terutama persoalan yang sensitif dari sudut pandang para informan;
- 2) perilaku pewawancara, perilaku wawancara ketika proses wawancara dapat pula mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informan;
- 3) situasi wawancara, peneliti akan menyesuaikan diri dengan situasi para informan dan meminta persetujuan kepada informan lokasi wawancara dan untuk meluangkan cukup waktunya untuk diwawancarai (Afrizal, 2008: 99-100).

Kemudian peneliti juga akan mewawancarai informan yang kredibel, yaitu pedagang yang terlibat dalam resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.

Untuk lebih jelasnya mengenai identitas informan, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Identitas Informan Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah	Alasan Dipilih
1.	Ketua Pedagang Inpres I Pasar Raya	1 orang	Ketua Pedagang lebih mengetahui permasalahan pedagang Pasar Inpres I Pasar Raya Padang
2.	Dinas Pasar Raya Padang	1 orang	Dinas Pasar berperan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil yang berhubungan dengan Pasar Raya Padang
3.	Pedagang yang terlibat aktif dalam konflik dengan Pemko Padang	4 orang	Permasalahan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan pedagang Pasar Inpres I
4	Ketua Koordinator PBHI	1 orang	PBHI adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh pedagang dalam permasalahan Pasar Raya Padang

1.6.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung di lapangan berdasarkan sumber yang telah ditentukan, dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.

Data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. penyebab resistensi yang dilakukan oleh pedagang Inpres I Pasar Raya Padang
- b. bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari literatur atau studi pustaka berupa bahan tertulis, hasil penelitian, makalah, jurnal atau artikel dan studi dokumentasi yang mempunyai relevansi dengan resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang. Data ini berupa dokumen-dokumen, notulensi rapat, hasil rapat, surat-surat, foto aksi pedagang, dan koordinasi antar pedagang. Salah satu data sekunder yang diambil adalah

data yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang pembangunan Blok I Pasar Raya Padang yang sumber datanya dapat diperoleh dari Kantor Dinas Pasar Raya Padang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara (*interview*) merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer, seperti apa yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266) maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan perasaan.

Wawancara juga berarti percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1994:135).

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan menditel dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan hanya mempunyai pertanyaan yang umum yang kemudian diditelkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2008: 24).

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Taylor dalam Afrizal, 2005 : 44). Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan (Afrizal, 2005 : 44).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa orang informan, yaitu Ketua Pedagang Pasar Inpres I, Pedagang yang terlibat aktif dalam konflik dengan Pemko Padang, Kepala Dinas Pasar Raya Padang.

Dalam proses wawancara yang dilakukan dengan pedagang, maka sebelumnya peneliti menayakan kesediaannya untuk diwawancarai, kemudian selama melakukan wawancara peneliti dan informan saling berinteraktif sehingga tercipta hubungan yang baik dan informasi yang didapatkanpun lebih baik.

Pada saat pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi peneliti menggunakan pancaindera dalam pengambilan data di lapangan dan dengan teknik wawancara mendalam ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, kertas, dan pena.

b. Pengumpulan Dokumen

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen dari pada hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah terhadap sesuatu (Afrizal, 2008: 24-25).

Tabel 1.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Teknik yang digunakan	Informan
1	Mendeskripsikan penyebab resistensi pedagang terhadap pembangunan Pasar Inpres I Pasar Raya Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Data primer: penyebab resistensi pedagang terhadap pembangunan Pasar Inpres I Pasar Raya Padang. • Data sekunder: literature, hasil penelitian, makalah, jurnal atau artikel dan studi dokumentasi yang terkait mempunyai relevansi dengan resistensi pedagang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Pengumpulan Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pedagang Pasar Inpres I
2	Mendeskripsikan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang terkait konflik Pasar Raya Padang	<ul style="list-style-type: none"> • Data primer: bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang terkait konflik Pasar Raya Padang • Data sekunder: literature, hasil penelitian, makalah, jurnal atau artikel dan studi dokumentasi yang terkait mempunyai relevansi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Pengumpulan Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pedagang Pasar Inpres I • Dinas Pasar

		resistensi pedagang Pasar Raya Padang		
--	--	---	--	--

Sumber: hasil interpretasi peneliti.

1.6.4. Proses Penelitian

Proses

penelitian dimulai dengan melakukan survai awal melalui observasi mengenai keadaan Pasar Raya Padang pasca gempa. Observasi ini dilakukan pada September 2011 dimana pada saat itu peneliti sengaja berjalan-jalan di lokasi pembangunan Pasar Inpres I dan bekas tempat penampungan sementara untuk pedagang Pasar Inpres I. Dari observasi peneliti melihat bagaimana aktivitas mereka selama berdagang. Dari observasi tersebut, peneliti melihat bahwa kios-kios yang terdapat di kios gedung Blok I berukuran sangat kecil, yaitu berukuran 2x2 m. Hal ini berbeda dengan kios yang ada pada Pasar Inpres I yang sudah runtuh tersebut.

Pada tanggal 16 April 2012, peneliti memasukkan surat permohonan untuk melakukan penelitian ke Kantor Kesbangpol Kota Padang. Setelah surat izin tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 April 2012, maka peneliti langsung memasukkan surat izin untuk pengambilan data ke Kantor Dinas Pasar, dan menanyakan langsung kapan peneliti bisa melakukan wawancara dengan informan terkait.

Pada tanggal 30 April 2012 peneliti mendatangi kantor Dinas Pasar jam 10.00 WIB dan bertemu dengan Bapak Anasrul Amir (staf Dinas Pasar Bagian Perencanaan dan Evaluasi). Pada kesempatan ini beliau menanyakan mengenai tujuan dan dokumen apa saja yang diperlukan dalam penelitian ini. Beliau meminta peneliti untuk menemui beliau tanggal 8 Mei 2012. Pada tanggal 8 Mei 2012 peneliti menemui Bapak Anasrul Amir untuk meminta dokumen yang diperlukan seperti SK Gubernur, SK Walikota, Rekomendasi DPRD, data pedagang Inpres I yang lama, data pedagang Inpres I yang sudah menempati kios di Blok I, denah Pasar Raya Padang, tabel harga kios yang ada di Blok I. Ketika peneliti menanyakan kapan waktunya peneliti bisa melakukan wawancara, beliau menjanjikan minggu depan,

sampai pada tanggal 16 Mei peneliti baru dapat melakukan wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Evaluasi yaitu Ibu Hasna, S. Sos, MM. Wawancara yang dilakukan adalah mengenai kronologis pembangunan Blok I sampai pada penempatan pedagang pada kios yang ada di Blok I.

Pada tanggal 10 Mei 2012 pukul 10.00 WIB, peneliti pergi ke PBHI Sumatera Barat untuk menanyakan berbagai informasi terkait masalah yang ada di Pasar Raya Padang khususnya konflik Pemko dengan pedagang terkait pembangunan Blok I Pasar Raya. Di sana peneliti bertemu dengan Bang Jefri selaku koordinator Pasar Inpres I dari PBHI. Pada hari itu juga peneliti dipertemukan oleh Bang Jefri dengan Buya (pedagang Pasar Inpres I yang aktif dalam melakukan resistensi terhadap pembangunan Blok I Pasar Raya Padang). Di sini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Buya terkait kronologis dan resistensi pedagang terhadap pembangunan Blok I serta upaya apa yang sudah dilakukan terkait hal itu.

Pada tanggal 29 Mei 2012 peneliti melakukan wawancara di Pasar Raya dengan Ibu Mus (pedagang sayur) yang dahulu beliau berjualan di Pasar Inpres I. Di sini peneliti mewawancarai informan mengenai alasan beliau masih tetap berjualan di emperan, tepatnya di lokasi penampungan Inpres II.

Pada tanggal 1 Juni 2012 peneliti melakukan wawancara di Pasar Raya dengan Ibu As (pedagang PMD) yang dahulu beliau berjualan di Pasar Inpres I. Di sini peneliti mewawancarai informan mengenai alasan beliau masih tetap berjualan di emperan, tepatnya di bekas lokasi penampungan Inpres I.

Pada tanggal 21 Juni 2012 peneliti melakukan wawancara di Pasar Raya dengan Bapak Un (pedagang beras dan juga koordinator Pasar Inpres I) yang dahulu beliau berjualan di Pasar Inpres I. Di sini peneliti mewawancarai informan mengenai kronologis dan resistensi pedagang terhadap pembangunan Blok I serta upaya apa yang sudah dilakukan terkait hal itu.

Kesulitan yang peneliti temui sewaktu melakukan penelitian adalah dalam meminta kesediaan informan (Dinas Pasar) untuk diwawancarai karena mereka sibuk dengan aktivitasnya, seperti ada rapat mendadak, dipanggil oleh atasan, pergi ke instansi lain. Informan tidak bisa memberikan waktu khusus bagi peneliti untuk melakukan wawancara, sehingga wawancara sering terputus-putus. Kesulitan ketika wawancara dengan pedagang adalah terganggu karena informan tetap terus berjualan dan melayani konsumennya dan juga pedagang juga kadang karena terlalu sibuk diminta untuk besok dan besoknya lagi mendatangi beliau. Ada juga informan penelitian (pedagang Pasar Inpres I) yang takut untuk diwawancarai.

6.4. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok, yakni resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.

6.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung arti pengujian sistematis terhadap data. Pengujian sistematis ini dilakukan untuk menentukan bagian-bagian dari data yang telah diumpulkan, hubungan di antara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan, serta hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan cara mengkategorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (Spradley, 1997: 117-119). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Selama proses penelitian, seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya (Afrizal, 2008: 81).

Menurut Miles dan Huberman (dalam Afrizal, 2008: 83-85), menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Tahap pertama adalah tahap kodifikasi data yang merupakan tahap koding terhadap data. Pada tahap pertama dalam analisis data, peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat ketika wawancara mendalam dilakukan. Apabila wawancara direkam, maka tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan setelah rekaman ditranskrip, peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkripsi untuk memilih informasi yang penting dan yang tidak penting dengan cara memberikan tanda-tanda. Pada tahap ini, catatan lapangan telah penuh dengan tanda-tanda dan dengan tanda tersebut peneliti telah dapat mengidentifikasi mana data yang penting dan mana data yang tidak penting yang ada dalam catatan lapangan. Selanjutnya tahap kedua yaitu melakukan kategorisasi data atau pengelompokan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi. Berdasarkan kodifikasi data, yang menentukan data penting dan tidak penting pada tahap pertama, peneliti membuat kategori-kategori dari data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya.

Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan terkontrol. Penelitian kualitatif sangat memperhatikan validitas data. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pedagang yang melakukan resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang untuk mengetahui bagaimana resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang.

Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikit banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul. Melainkan ketepatan atau kesesuaian informan dengan

informasi yang diperlukan. Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. Dalam kaitan ini, triangulasi dapat berarti adanya informan-informan yang berbeda atau adanya sumber data yang berbeda mengenai sesuatu. Triangulasi tersebut dapat dilakukan secara terus menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai dia yakin datanya valid.

Data yang didapat dari mengumpulkan dokumen-dokumen terkait konflik ini, diharapkan akan mampu untuk menjelaskan resistensi pedagang dalam konflik pembangunan Blok I Pasar Raya Padang, ditambahkan lagi dengan wawancara dengan pedagang yang melakukan resistensi ini agar kebenaran data dapat dilacak kebenarannya.

1.6.6. Definisi Konsep

1. Resistensi merupakan setiap (semua) tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tanah, Negara, pemilik mesin dan lain-lain) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap kelas-kelas atasan ini. Pedagang adalah orang yang melakukan jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan laba (Scott, 2000: 40).
2. Pedagang Pasar Inpres I adalah orang-orang yang dahulu berjualan di Pasar Inpres I Pasar Raya Padang
3. Pemko Padang adalah pihak berwenang yang dilegitimasi secara hukum dan diberi kewenangan untuk mengelola Kota Padang serta memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan pasar kedepannya

sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan.

4. Konflik adalah pertentangan kepentingan antara pemegang otoritas dengan yang tidak memiliki otoritas (Dahrendorf).
5. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
6. Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan dalam rangka pemulihan kondisi wilayah korban bencana dari dampak bencana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Raya Padang, hal ini dikarenakan pedagang Inpres I yang menolak pindah ke lokasi baru yaitu Blok I masih bertahan berjualan di Pasar Raya Padang. Konflik ini terjadi antara Pedagang Pasar Raya dengan Pemko Padang. Untuk

